



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**
**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS
KETENAGAKERJAAN, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2013-2014
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: RDPU
Dengan	: Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 12 Juni 2014
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: Audiensi
Ketua Rapat	: DR. Poempida Hidayatulloh, BEng (Hon), PhD, DIC/Anggota Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dibuka pukul 14.45 WIB dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain terkait penyelesaian masalah outsourcing perusahaan swasta dan BUMN di provinsi Jawa Timur
2. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa permasalahan di Jawa Timur, antara lain:
 - a. Adanya perusahaan BUMN yang terindikasi menerapkan praktek outsourcing untuk pekerjaan yang sifatnya pekerjaan utama (*core*

business), seperti petugas Teller di perusahaan Bank-bank Pemerintah di Jawa Timur.

- b. Adanya potensi ancaman PHK pada pekerjaan di perusahaan rokok, dengan jenis pekerjaan seperti melinting rokok dan sebagainya disebabkan berkurangnya produksi rokok kretek pada perusahaan rokok di Jawa Timur.
3. BUMN selaku Badan Usaha Milik Negara yang memang berfungsi untuk mencari keuntungan jangan menafikan fungsi untuk mensejahterakan karyawannya. BUMN diharapkan menjadi contoh perusahaan-perusahaan swasta dalam rangka pembinaan terhadap karyawannya dan jangan malah memberikan contoh buruk kepada perusahaan swasta, seperti praktek PHK, intimidasi dan sebagainya.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menerima aspirasi Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain terkait penyelesaian masalah outsourcing perusahaan swasta dan BUMN di provinsi Jawa Timur. Selanjutnya segala masukan yang disampaikan dalam pertemuan pada hari ini akan menjadi bahan dalam rapat-rapat Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja.
2. Komisi IX DPR RI akan melakukan kunjungan spesifik ke provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Juni 2014 dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelesaian outsourcing swasta dan BUMN di Jawa Timur guna menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur.

Rapat diakhiri pukul 16.00 WIB

KETUA RAPAT,

DR. POEMPIDA HIDAYATULLOH, BEng (Hon), Ph.D, DIC

A-182